Cari Solusi Konflik Agraria 10 Desa di Kecamatan Lekok dan Nguling, Mas Bupati Rusdi Beraudiensi Dengan DPR RI



Rabu, 14 Januari 2026

Bupati Pasuruan bersama pimpinan DPRD melakukan audiensi ke DPR RI untuk mencari solusi konflik agraria yang melibatkan 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling dengan TNI AL. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan ke Kementerian Pertahanan, agar Pemerintah Pusat memahami kondisi riil di lapangan.

Konflik agraria yang telah berlangsung lama ini bukan hanya soal status lahan, tetapi juga menyangkut hak warga untuk hidup aman. Bupati berharap DPR RI dapat membantu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, terutama antara warga terdampak dan TNI AL, agar masyarakat dapat merasakan kemerdekaan.

Bupati Pasuruan berkomitmen memperjuangkan aspirasi 16 ribu Kepala Keluarga yang terkendala akses kebutuhan dasar akibat status lahan yang dianggap zona militer. Ia menyatakan tanggung jawabnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat hingga tercapai kepastian, keadilan, dan harapan.

Anggota Komisi I DPR RI menyarankan pendekatan penyelesaian yang melibatkan duduk bersama Kementerian Pertahanan dan ATR/BPN. Penting untuk memperjelas status hak atas tanah, bukti formal, peruntukan aset negara, serta meninjau kembali aspek historisnya.

DPR RI mendorong penyelesaian konflik secara non-litigasi atau musyawarah mufakat karena proses litigasi yang panjang. Kasus ini menjadi prioritas untuk segera mendapat solusi konstitusional melalui pendekatan mitigasi dan bukan hanya secara yuridis.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.